



**RENCANA KERJA
(R E N J A)
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS TENAGA KERJA
JL. LETJEND S.PARMAN NO.17 , TELP.(0281) 891187, FAX : (0281) 894861
PURBALINGGA 53316**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Purbalingga, 19 Juli 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690108 198803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja	7
2.2. Akuntabilitas Keuangan	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Isu Strategis	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	19
3.3. Arah Kebijakan Tahun 2023	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023.....	26
4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023	26
4.2. Pendanaan OPD	29
4.3. Matrik Renja OPD Tahun 2023 (RKT 2023)	30
BAB V PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM Kemenaker RI, RPJM Propinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, diarahkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman penyusunan rencana program kerja tahunan selama tahun 2023.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Purbalingga.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinnaker Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional / SSPN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98)
16. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Sebagai pedoman para pelaksana pembangunan ataupun lembaga dan stakeholder yang lain;
2. Alat pengendali dan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

Adapun Tujuannya adalah :

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga ataupun stakeholder yang lain;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan ;
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi indikator beserta data capaian kinerja OPD

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Isu Strategis

3.2. Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

3.3. Arah Kebijakan Tahun 2023

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 .

4.2. Pendanaan OPD

4.3. Matrik Renja OPD Tahun 2023 (RKT 2023)

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja tahun 2021 akan dipaparkan berupa uraian dan analisis capaian kinerja, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial dilihat dari Indeks Kinerja Utama OPD meliputi :

1. Cakupan pencari kerja yang ditempatkan, dari target kinerja 46% yang harus tercapai pada tahun 2021, realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 45,6% naik dari tahun yang lalu sebesar 25,8% atau capaian kinerja sebesar 99%. Dari data pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga sebanyak 14.560 orang, maka yang ditempatkan sebanyak 6.633 orang. Hal ini banyak dipengaruhi kondisi wabah pandemi Covid 19 yang berdampak pada pengurangan karyawan perusahaan dan semakin sedikitnya lowongan pekerjaan di masa pandemi.
2. Rasio tenaga kerja yang mendapat upah sesuai UMK dari target kinerja sebesar 95% yang harus dicapai pada tahun 2021, realisasi kinerja pada tahun 2021 melampaui target sebesar 96,4%, capaian kinerja sebesar 101%. Dari hasil survey sejumlah 53.946 orang tenaga kerja maka sebanyak 52.004 orang tenaga kerja telah mendapatkan pembayaran penghasilan sesuai UMK.

Capaian kinerja sasaran tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.

Capaian Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja Yang Layak dan Terlindungi Jaminan sosial

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Capaian Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6
• Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial	• Cakupan pencari kerja yang ditempatkan.	46%	45,6%	99%	19,8%
	• Rasio tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK	95%	96,4%	101%	98,16%
	Rata – rata Capaian Sasaran			100%	

Dari tabel tersebut dapat dilihat rata-rata capaian sasaran meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial adalah cukup baik yaitu sebesar 100%

Pencapaian target tersebut untuk indikator sasaran cakupan pencari kerja yang ditempatkan dengan cara *Job canvassing*, sosialisasi lowongan kerja, sosialisasi transmigrasi, fasilitasi penempatan kerja, pelatihan kerja, program unggulan kabupaten Purbalingga Kartu Prakerja dan lain lain melalui Program dan kegiatan sbb:

(I) Program Penempatan Kerja

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja

(II) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang didukung melalui kegiatan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Pelatihan berbasis kompetensi Instiusional dan Non Instiusional

- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster kompetensi
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta

Hambatan/Kendala yang dihadapi :

- Belum tersedianya data pengangguran sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat sasaran;
- Lowongan kerja masih sangat kurang untuk dapat menampung tenaga kerja yang ada karena terbatasnya lapangan kerja di Purbalingga;
- Pelatihan kerja masih kurang didukung sarana dan parasarana pelatihan, utamanya sangat kurangnya Instruktur Pelatihan dari PNS yang mengajar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Purbalingga;
- Terbatasnya paket pelatihan dari Pusat sehingga hanya sebagian pendaftar yang dapat terfasilitasi mengikuti pelatihan sementara animo masyarakat sangat besar;

Solusi/Upaya yang dilakukan adalah melalui :

- Job canvassing ke Perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan data lowongan pekerjaan dan mencari informasi tenaga kerja yang telah ditempatkan.
- Koordinasi dengan Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja secara rutin dilakukan untuk mendapatkan paket pelatihan lebih banyak lagi.

Indikator kinerja sasaran yang kedua adalah Rasio tenaga kerja mendapat upah sesuai UMK. Agar tenaga kerja terjamin haknya mendapat upah sesuai UMK maka dilaksanakan sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah, pemantauan UMK dan THR, pembinaan ke perusahaan-perusahaan, pemantauan ke pasar-pasar yang ada di Purbalingga yang

dilakukan secara rutin. Selain itu juga dilakukan bimbingan teknis terkait pengupahan di perusahaan yang dilakukan oleh Dinas dengan mengundang perwakilan dari Perusahaan yang menangani. Dengan demikian Perusahaan juga mengerti akan peraturan tentang pengupahan juga penghitungannya yang benar sehingga tidak melanggar pada peraturan perundangan yang telah ada.

Dalam usaha menjamin kesejahteraan pekerja dengan mendapat upah sesuai UMK tersebut didukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Hubungan Industrial yang didukung melalui kegiatan :

- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota :
 - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Hambatan/Kendala :

1. Sistem penggajian yang menggunakan sistem borongan sehingga menyulitkan dalam penghitungan UMK.
2. Dalam masa percobaan belum mahir, produktivitas masih sangat rendah tetapi harus sesuai UMK
3. Waktu untuk melaksanakan Bimtek harus menyesuaikan dengan Perusahaan
4. Banyaknya pekerja fluktuatif untuk beberapa bidang usaha yang tergantung pada musim.

Solusi/upaya :

- > Sosialisasi UMK dan Struktur Skala Upah
- > Pemantauan UMK dan THR di perusahaan-perusahaan.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan perangkat daerah maka didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sbb :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang / Material
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan:
Pemerintah Daerah**

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah:**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja tujuan menurunnya pengangguran terbuka adalah dilihat dari indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka.

Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja.

Maka dalam rangka mengurangi pengangguran dari hasil pelatihan dan penempatan kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 telah dapat mengurangi pengangguran sekurang-kurangnya sejumlah 6.633 orang.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka yang dicanangkan untuk kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar <5 %.

Apabila dibandingkan dengan target tersebut, maka berdasarkan Data BPS Purbalingga (belum dipublikasikan) untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2021 adalah sebesar 6,05%, dibandingkan tahun lalu 2020 tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,05% maka Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 0,05% realisasi belum bisa mencapai target <5 %, capaian kinerja sebesar 48,75%. Hal ini di sebabkan masa pandemi Covid 19 dimana banyak perusahaan yang mem PHK dan merumahkan karyawan sehingga menambah pengangguran, disamping itu semakin sedikitnya lowongan kerja karena perusahaan banyak yang belum melaksanakan perekrutan karyawan dimasa pandemi ini.

Permasalahan :

- Belum tersedianya data Pengangguran di kabupaten Purbalingga secara rinci dan update.
- Masih tingginya angkatan kerja sebagai penyumbang pengangguran.
- Terbatasnya lapangan kerja sehingga harus didukung dari sektor yang lain seperti investasi, pariwisata, pendidikan dan lainnya tidak hanya dari sisi pelatihan dan penempatan kerja saja tidaklah cukup.
- Jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja.
- Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja.
- Belum optimalnya kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.

Strategi :

1. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja
2. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait data pengangguran
3. Koordinasi secara intensif dengan kementerian tenaga kerja
4. Upaya penanganan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata dll, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar kerja.

Program-program yang mendukung pada pencapaian tujuan tersebut adalah sbb :

1. Program Penempatan Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

2.2. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan secara umum baik, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6.521.413.710 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 6.104.249.623 (93,6%).

Tabel

Tabel 2.
 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja
 Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	100.000.000	119.329.200	19.329.200	119,33
	BELANJA	6.521.413.710	6.104.249.623	(417.164.087)	93,60
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.910.230.500	4.745.344.140	(164.886.360)	96,64
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.415.000	8.341.300	(73.700)	99,12
1.	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3.665.000	3.591.300	(73.700)	97,99
2.	<i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4.750.000	4.750.000	-	100,00
B.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.781.837.000	3.698.145.311	(83.691.689)	97,79
1.	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	3.470.337.000	3.395.728.159	(74.608.841)	97,85
2.	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	30.000.000	23.438.100	(6.561.900)	78,13
3.	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan</i>	279.000.000	276.479.052	(2.520.948)	99,10
4.	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	2.500.000	2.500.000	-	100,00

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
C.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.079.500	129.368.050	(26.711.450)	82,89
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	7.619.000	7.619.000	-	100,00
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.315.000	3.295.000	(20.000)	99,40
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.911.000	54.199.800	(17.711.200)	75,37
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.583.000	23.507.750	(3.075.250)	88,43
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.344.000	3.570.000	(774.000)	82,18
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang / Material	24.657.500	23.620.500	(1.037.000)	95,79
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.650.000	13.556.000	(4.094.000)	76,80
D.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.400.000	75.157.800	(242.200)	99,68
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.400.000	75.157.800	(242.200)	99,68
E.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.190.000	372.220.179	(46.969.821)	88,80
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.190.000	687.000	(1.503.000)	31,37
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	198.000.000	160.215.092	(37.784.908)	80,92
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	0,00
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.000.000	211.318.087	(4.681.913)	97,83
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	45.069.000	45.065.000	(4.000)	99,99
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.540.000	20.574.500	(1.965.500)	91,28
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	401.700.000	396.472.000	(5.228.000)	98,70
II.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.455.354.500	1.207.218.808	(248.135.692)	82,95
A.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.450.354.500	1.204.673.808	(245.680.692)	83,06
1.	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi	1.450.354.500	1.204.673.808	(245.680.692)	83,06
B.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	5.000.000	2.545.000	(2.455.000)	50,90
1.	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	5.000.000	2.545.000	(2.455.000)	50,90
III.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	56.261.850	53.088.470	(3.173.380)	94,36
A.	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	56.261.850	53.088.470	(3.173.380)	94,36
1.	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	56.261.850	53.088.470	(3.173.380)	94,36
IV.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	99.566.860	98.598.205	(968.655)	99,03
A.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	99.566.860	98.598.205	(968.655)	99,03
1.	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	39.049.900	38.904.735	(145.165)	99,63
2.	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	60.516.960	59.693.470	(823.490)	98,64

Tabel 3.
Analisis Efisiensi Sasaran Tahun 2021

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	% ANGGARAN	Rata % CAPAIAN KINERJA	KET.
1.Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan social	1.611.183.210	1.358.905.383	84.34%	100%	efisien

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sasaran meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial adalah efisien dengan realisasi anggaran sebesar 84,34% Rata-rata capaian kinerja sebesar 100 % persentase anggaran lebih rendah untuk capaian kinerja yakni sebesar 100%.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Isu Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Purbalingga maka dirumuskan dalam rencana program dan kegiatan yang mengacu pada permasalahan yang ada. Permasalahan atau Isu Strategis Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga adalah menyangkut pengangguran di Kabupaten Purbalingga.

Isu pengangguran perlu mendapat perhatian. Penganggur adalah angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan suatu pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan. Di kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 berdasarkan data BPS angka pengangguran masih tinggi yakni 6,05 %.

Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja.

Sehubungan dengan itu maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan kerja, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang

berorientasi pada pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.

Permasalahan terkait ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang didominasi pendidikan Sekolah Dasar.
- b. Mismatch pendidikan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia
- c. Penempatan kerja belum optimal sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki.
- d. Perlunya perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak pekerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Berdasarkan pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Purbalingga adalah **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**. Guna mencapai visi tersebut, dilaksanakan melalui tujuh Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan

dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari misi tersebut yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu pada Misi ke 5 yaitu **Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”**.

Tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dari Misi ke-5 adalah meningkatnya daya saing ekonomi daerah (pertumbuhan ekonomi daerah) dengan sasaran :

1. Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah (PDRB Per Kapita).
2. **Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha (TPT)**

Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut yang dapat didukung pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi OPD di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga mempunyai **tujuan “Meningkatnya Kesempatan Kerja”**.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan penempatan kerja
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perlu dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja tujuan yakni Meningkatnya kesempatan kerja adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), **Indikator kinerja sasaran 1** yakni Meningkatkan penempatan kerja adalah Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, dan Indikator kinerja sasaran 2 adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan adalah Nilai Sakip Dinnaker.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perlu dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

- a. **Indikator kinerja tujuan** yakni Meningkatnya kesempatan kerja adalah Tingkat Kesempatan Kerja dengan target pada tahun 2023 sebanyak 95%
- b. **Indikator kinerja sasaran :**
 1. Meningkatkan penempatan kerja yakni Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dengan target pada tahun 2023 sebanyak 6.885 orang.
 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan yakni Nilai Sakip Dinnaker dengan target pada tahun 2023 sebesar 70,22.

Pengukuran Indikator kinerja utama tersebut dapat terukur melalui formulasi perhitungan indikator kinerja utama pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Formulasi Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
		Dasar	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
3	4	5	6
Tingkat Kesempatan Kerja	persen	Sumber BPS	$\frac{\text{Jumlah yg bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$

Strategi yang digunakan dalam pencapaian sasaran meningkatkan penempatan kerja tersebut di atas melalui upaya :

“Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, berdaya saing tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.

Dengan arah kebijakan :

1. Meningkatkan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar/wirausaha mandiri;
2. Memperluas Kesempatan Kerja;
3. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.

3.3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Dalam rangka **meningkatkan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja** untuk memenuhi kebutuhan pasar/wirausaha mandiri melalui:

- **Program Unggulan Kartu Prakerja Purbalingga**

Kartu Prakerja ini adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia khususnya Warga Purbalingga yang belum memiliki ketrampilan. Sebagai kelompok sasaran diprioritaskan bagi pekerja yang terdampak PHK karena Pandemi Covid 19 dan para pencari kerja. Ruang lingkup program Kartu Pra Kerja meliputi :

- Kelas Entrepreneur
 1. Pembekalan Kewirausahaan
 2. Pendampingan Pengembangan Usaha
 3. Bantuan Sarana Usaha
- Kelas Industri
 1. Pelatihan Kompetensi Industri
 2. Penempatan Kerja Industri

Dalam rangka Program Kartu Prakerja Purbalingga ini, peserta dibekali dengan pelatihan sebagai berikut:

> Pelatihan Kerja Berbasis Kebutuhan Masyarakat :

- Pelatihan pengolahan makanan, konveksi/garmen, potong rambut, rias manten, kerajinan, kapster salon dan lainnya.

> Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi :

- Pelatihan klasikal yang berdasarkan pada kurikulum dan silabus yang telah ditentukan dengan Instruktur yang memiliki kompetensi di bidang kejuruan masing-masing seperti LAS SMAW 3G, Otomotif roda 2, Garmen Apparel, Tata Boga, TIK dan lainnya.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di Balai Latihan Kerja UPTD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS) di sekitar Kabupaten Purbalingga.

Dalam rangka **memperluas kesempatan kerja** melalui :

- Program Inovasi Whatsapp Blast Mayuh Ngode

Program Inovasi Whatsapp Blast Mayuh Ngode merupakan program aplikasi Whatsapp sebagai fitur unggulan sistem antar kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga. Program ini mengelola baik dari data pencari kerja (pendidikan, minat pekerjaan, pengalaman kerja dan kompetensinya), juga permintaan perusahaan terkait lowongan kerja perusahaan (jabatan, kualifikasi dan deskripsi kerja). Data tersebut selanjutnya diolah dan dilakukan *Job Matching* (kompetensi pekerja dicocokkan dengan kualifikasi jabatan yang diinginkan perusahaan/pemberi kerja) serta penyebar luasan informasi kepada pencari kerja tentang lowongan kerja yang sesuai dengan kompetensinya.

- Pelayanan antar kerja

Pelayanan antar kerja dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga melalui :

1. AKAL/Antar Kerja Antar Lokal untuk Purbalingga dan area Jawa Tengah;
2. AKAD/Antar Kerja Antar Daerah untuk lintas Provinsi; Pabrik Tekstil, Pabrik Elektronik (Batam), Perkebunan Sawit (Kalimantan) dan lainnya;
3. AKAN/Antar Kerja Antar Negara untuk lintas negara (Jepang, Korea, Taiwan dan lainnya);

- **Pelaksanaan program transmigrasi dan padat karya kurang terdidik :**

1. Pelaksanaan program transmigrasi melalui upaya penyiapan calon transmigran meliputi rekrutmen dan pelatihan calon transmigran.
2. Pelaksanaan padat karya pekerjaan umum kurang terdidik melalui program Kemenaker RI yang mendorong pekerja sebanyak mungkin untuk melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna (Tenaga Kerja Mandiri);

Dalam rangka **Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis** maka peningkatan hubungan industrial yang harmonis dilaksanakan melalui pembinaan ke perusahaan-perusahaan terkait ketenagakerjaan dalam upaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta harmonis dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023

Untuk merealisasikan visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun program dan kegiatan:

a. Program

Program pembangunan khususnya yang ditujukan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah diperlukan penguatan kelembagaan daerah berupa :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah:
 - 1.a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - 1.b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - 2.a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2.b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2.c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - 3.a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - 4.a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 4.g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 4. i. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 5.a. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 6.a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 6.c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6.d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 7.a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional
 - 7.b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Program Perencanaan Tenaga Kerja meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - 1.a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1.a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan dan Pendidikan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan Unit klaster Kompetensi (termasuk didalamnya untuk pelaksanaan kegiatan Program Unggulan Kartu Prakerja Purbalingga dan inovasi Program Rame-rame Ngode)
 - 2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Sub Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- Program Penempatan Tenaga Kerja meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan : Pelayanan antar kerja

- Program Hubungan Industrial meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - 1.a. Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah
 - 1.b. Sub Kegiatan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah

- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1.a. Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

4.2. Pendanaan OPD

Pagu indikatif OPD Tahun 2023 : Rp **5.865.697.000**

4.3. Matrik Renja OPD Tahun 2023 (RKT Tahun 2023)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dapat dilihat dalam Matrik berikut ini.

Tabel 5
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
P E N D A P A T A N				100.000.000				100.000.000
B E L A N J A				5.865.697.000				5.865.697.000
A.	Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Purbalingga	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	8.415.000	DAU	100%	8.415.000
			2. Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	3.816.956.000		100%	3.816.956.000
			3. Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pem. daerah	100%	961.685.000		100%	961.685.000
			4. Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	6.000.000		100%	6.000.000
			5. Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	12.500.000		100%	12.500.000
			6. Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	184.291.000		100%	184.291.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Purbalingga	100%	8.415.000	DAU		100%	8.415.000
a	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Purbalingga	6 dok	4.415.000	DAU		6 dok	4.415.000
b	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Purbalingga	6 dok	4.000.000	DAU		6 dok	4.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Purbalingga	100%	3.816.956.000	DAU		100%	3.816.956.000
a	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Purbalingga	32 orang	3.692.956.000	DAU		32 orang	3.692.956.000
b	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Purbalingga	12 dokumen	104.000.000	DAU		12 dokumen	104.000.000
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Purbalingga	12 dokumen	20.000,000	DAU		12 dokumen	20.000,000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	Purbalingga	100%	6.000.000	DAU		100%	6.000.000
a	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Purbalingga	12 dok	6.000.000	DAU		12 dok	6.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Purbalingga	100%	100.373.000	DAU		100%	100.373.000
a	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Purbalingga	1 paket	7.619.000	DAU		1 paket	7.619.000
b	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Purbalingga	1 paket	68.450.000	DAU		1 paket	68.450.000
c	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Purbalingga	12 dok	-	DAU		12 dok	-
d	Sub Keg. Fasilitasi kunjungan tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Purbalingga	100%	5.010.000	DAU		100%	5.010.000
e	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Purbalingga	100%	12.344.000	DAU		100%	12.344.000
f.	Sub Kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	Purbalingga	12 dok	6.950,000	DAU		12 dok	6.950,000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan peralatan dan mesin	Purbalingga	100%	12.500.000	DAU		100%	12.500.000
a	Sub Keg. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Purbalingga	2 paket	12.500.000	DAU		2 paket	12.500.000
7	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Purbalingga	100%	861.312.000	DAU		100%	861.312.000
a	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	12 laporan	2.220.000	DAU		12 laporan	2.220.000
b	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Purbalingga	12 laporan	198.000.000	DAU		12 laporan	198.000.000
c	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Purbalingga	12 laporan	3.000.000	DAU		12 laporan	3.000.000
d	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Purbalingga	12 laporan	658.092.000	DAU		12 laporan	658.092.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Purbalingga	100%	184.291.000	DAU		100%	184.291.000
a	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Purbalingga	30 unit	95.262.000	DAU		30 unit	95.262.000
b	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Purbalingga	1 paket	19.159.000	DAU		1 paket	19.159.000
c	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Purbalingga	1 paket	69.870.000	DAU		1 paket	69.870.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
B	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	Purbalingga	3.86%	218.600.000	DAU		3,86%	218.600.000
9	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	Jumlah paket pelatihan	Purbalingga	5 paket	218.600.000	DAU		20 paket	218.600.000
a	Sub Keg. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	Purbalingga	80 orang	168.600.000	DAU		80 orang	168.600.000
b.	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/k oordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada Tahun 2023	Purbalingga	4 lembaga	10.000.000	DAU		4 lembaga	25.000.000
10	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang terakreditasi	Purbalingga	100%	30.000.000	DAU		100%	30.000.000
a	Sub Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dbina	Purbalingga	15 LPKS	30.000.000	DAU		15	30.000.000

C	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	Purbalingga	50,23%	525.000.000	DAU		54,79%	525.000.000
11	Pelayanan antar kerja di daerah	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Akad, Akan dan Program Kartu Prakerja	Purbalingga	228	525.000.000	DAU		228	525.000.000
a	Sub Keg. Pelayanan antar kerja	Jumlah sosialisasi dan job canvasing	Purbalingga	30 kali	525.000.000	DAU		30 kali	525.000.000
D	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Purbalingga	93,01%	57.250.000	DAU		93,4%	57.250.000
12	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah	Prosentase pembinaan ke perusahaan	Purbalingga	95%	57.250.000	DAU		95%	57.250.000

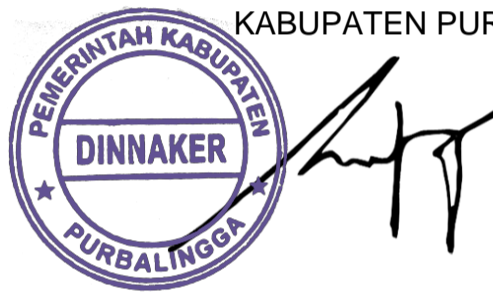
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2024	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a Sub Keg. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah	Jumlah perusahaan yang dibina terkait peraturan ketenagakerjaan	Purbalingga	60 Perush	22.000.000	DAU		60 Perush	22.000.000
b Sub Keg. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah	Persentase jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	Purbalingga	95%	35.250.000	DAU		95%	35.250.000
E PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Purbalingga	100%	25.000.000	DAU		100%	25.000.000
1 Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja tersusun	Purbalingga	1 dokumen	25.000.000	DAU		1 dokumen	25.000.000
a Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah buku rencana tenaga kerja mikro tersusun	Purbalingga	1 buku	25.000.000	DAU		1 buku	25.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Purbalingga	3 KK	50.000.000	DAU		3 KK	50.000.000
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang difasilitasi	Purbalingga	100%	50.000.000	DAU		100%	50.000.000
Sub Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	Purbalingga	3 KK	50.000.000	DAU		3 KK	50.000.000

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian dari awal proses fungsi manajemen. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan akan tergantung pula pada proses fungsi manajemen lainnya, yaitu kualitas perencanaan pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan pengawasan. Namun demikian paling tidak penyusunan rencana yang baik akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam kerangka itulah rencana kerja ini disusun secara bertahap agar dapat membantu terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 19 Juli 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. BAMBANG WIDJONARKO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690108 198803 1 001